



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL APIPUDIN**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **141122**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.255.000.000**

1. Tanah Seluas 388 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 10363 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 265.000.000
3. Tanah Seluas 3499 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 3772 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 175.000.000
5. Tanah Seluas 1985 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 110.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 267 m2/267 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/87 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 164.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT Tahun 2015, LAINNYA Rp. 125.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.350.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	78.369.779
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.503.219.779
III. HUTANG	Rp.	80.226.574
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.422.993.205

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.